

DGM INDONESIA

CERITA DARI MITRA 2019



Mekanisme Hibah Khusus di Indonesia telah dimulai sejak 2017 dengan mengundang peminat baik masyarakat adat maupun komunitas lokal di tujuh region (Sumatera, Jawa, Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua). Namun baru lengkap hasil seleksi sub proyek tahap pertamanya pada tahun 2018. Dari 208 proposal yang diterima, hanya 21 penerima hibah tahap pertama yang ditetapkan oleh National Steering Committee (NSC) dengan alokasi 3 penerima hibah di setiap region. Dalam Cerita dari Mitra Tahun 2019 ini tergambar secara ringkas perkembangan kegiatan tiga mitra yang menerima hibah DGM-I tahap pertama.

Pada tahun 2018, terjadi gempa dan likuifaksi di Sulawesi Tengah, salah satu penerima hibah DGM-I, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Sulawesi Tengah merupakan mitra yang terkena dampak, namun bencana alam tersebut menguatkan daya lenting pelaksana dan masyarakat Adat. Sementara, cerita lainnya adalah dari Barat Indonesia yaitu AMAN Kepulauan Mentawai dan dari Timur Indonesia yaitu Organisasi Perempuan Adat (ORPA) Namblong, Papua.

Di tahun 2019, DGM-I ditetapkan 28 penerima hibah tahap 2 oleh NSC dari hasil seleksi 247 kertas konsep yang diterima. Sehingga pada tahun 2019 ada 49 penerima hibah DGM-I. Sehingga pada tahun 2019 ada 49 penerima hibah DGM-I yang mencakup 176 lokasi komunitas (97 lokasi pada tahap 1 dan 79 lokasi di tahap 2)

The Dedicated Grant Mechanism in Indonesia has been started since 2017 through invitation for any proposers from both indigenous and local communities in seven regions (Sumatra, Java, Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku and Papua). However, the first round of sub project selection results was completed in 2018. Of the 208 proposals received 21 sub project approved by the National Steering Committee (NSC) which meant there are 3 sub projects in each region. This 2019 Partners' Stories describes a brief activities summary from three partners from the first engagement of DGM-I.

In 2018, an earthquake and liquefaction hit Central Sulawesi. One of the sub projects of the DGM-I, the Indigenous Peoples Alliance of Archipelago of Central Sulawesi Chapter was affected but the natural disaster strengthened the resilience of the implementor and the Indigenous people. The other stories are AMAN Mentawai from the western of Indonesia, and Indigenous Women's Organization (ORPA) Namblong, from the eastern of Indonesia.

In 2019, DGM-I NSC approved 28 sub projects to receive second round grants. Those were selected as a result of 247 concept notes selection. Up to 2019, there are 49 sub projects who implement DGM-I program. In 176 locations (97 locations of first round and 79 locations of second round).



Daya Lenting Masyarakat Adat dalam Menghadapi Bencana Alam

Likuifaksi di Desa Petobo, Palu, Sulawesi Tengah. Foto : Andhika Vega/SAMDHANA.

Indonesia memiliki potensi gempa bumi akibat pergerakan lempeng bumi, salah satunya adalah yang terjadi pada 28 September 2018. Sudah setahun setelah bencana, masyarakat yang mengalaminya telah bertahan dan terus berupaya untuk mencapai impian mereka meskipun menghadapi rintangan, khususnya di Desa Tanggulowi, Kabupaten Sigi, dan sembilan komunitas yang wilayahnya berdekatan dengan Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah.

Gempa kuat tersebut menyebabkan kerusakan besar dan korban jiwa di Kota Palu, serta Kabupaten Donggala, Parigi Moutong, dan Sigi. Gempa berkekuatan 6.0 terjadi pada pukul 13.59 WIT dan telah menyebabkan kerusakan bangunan. Setelah itu, gempa M 7,4 terjadi pada pukul 17:02 WIT menyebabkan lebih banyak kerusakan. Ini kemudian memicu tsunami di tepi pantai, mungkin karena tanah longsor di dasar laut dan tsunami melanda pantai Talise di Kota Palu dan pantai di Donggala dan beberapa pemukiman dan bangunan di pantai.¹

Likuifaksi dilaporkan terjadi di Desa Petobo, Palu, dengan lumpur hitam naik hingga lima meter dan mengubur hampir ratusan orang. Likuifaksi juga telah dilaporkan terjadi di Palu Selatan, Biromaru (Kabupaten Sigi) dan Desa Sidera (Kabupaten Sigi). Sedangkan kejadian tanah longsor dari Toboli ke Palu dilaporkan, dan

memberikan dampak kerusakan dan korban jiwa yang besar.²

Sesaat setelah kejadian bencana, akses ke Palu sulit ditempuh, akses jalan ke daerah yang terkena dampak dari sisi Utara (Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo) tidak dapat dilalui karena kerusakan. Akses yang dapat dilalui adalah jalan dari Selatan (dari Makassar-Sulawesi Selatan dan Poso-Sulawesi Tengah) dan juga Bandara Mutiara Sis al-Jufri Palu, yang telah dibuka sejak 3 Oktober 2018.³

Sebulan sebelum bencana, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kepulauan Sulawesi Tengah (AMAN Sulawesi Tengah) memulai implementasi program DGM-I di 3 kabupaten yaitu Sigi (tiga komunitas), Parigi Moutong (satu komunitas) dan Poso (sembilan komunitas). Memfasilitasi 13 komunitas, AMAN Sulawesi Tengah sama bersemangatnya dengan komunitas. Mereka memulai sosialisasi di 3 kabupaten. Masyarakat dan pemerintah daerah bersedia untuk mendukung program dan setuju untuk memproses Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di setiap kabupaten.

Rizal Mahfud, Manajer Proyek, mengatakan bahwa ketika gempa bumi terjadi, staf di kantor AMAN Sulawesi Tengah sedang menyusun

laporan kegiatan periode September 2018. Mereka selamat setelah keluar dari kantor pada saat jeda antara gempa pertama dan kedua .

Beruntungnya, kantor mereka tidak rusak, hanya retak di dinding. Bahkan kantor mereka menjadi pos untuk menerima bantuan dari seluruh Indonesia.

Hikmah dari bencana ini, adalah dorongan yang

kuat dari Pemerintah Daerah di Kabupaten Poso untuk mempercepat pengembangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Poso.

Saat ini, AMAN Sulawesi Tengah dan Pemertintah Kabupaten Poso telah memiliki rancangan PERDA dan SK Bupati untuk Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat serta Hutan Adat. Meskipun program

Community Resilience upon Natural Disaster

Indonesia is well known with potential earthquake due to movement of earth plate, the recent was on 28 September 2018. Almost a year from the disaster, the community who happened to experience it has survived and moves on to achieve their dream despite the hindering condition, in Tanggulowi Village, Sigi District, and nine communities which their territories adjacent to National Park Lore Lindu, Central Sulawesi.

Strong earthquakes occurred on 28 September 2018 and caused great damages and casualties in Palu City, and regencies of Donggala, Parigi Moutong, and Sigi. An earthquake with magnitude 6.0 occurred at 13.59 hrs UTC+7 and already caused building damages. Afterward, an M 7.7 (updated to M 7.4) earthquake occurred at 17:02 hrs caused more damages. It then triggered a near-field tsunami, possibly due to landslide in the ocean floor and the tsunami struck Talise Beach in Palu City and beaches in Donggala and some settlements and buildings on the beach.¹

Liquefaction has been reported in Petobo village in Palu, with black mud rising up to five meters and reportedly burying nearly one hundred people alive. Liquefaction has also been reported in South Palu, Biromaru and Sidera village (both were in Sigi District). Landslides from Toboli to Palu have been reported.²

Access to Palu was difficult. Road access to the affected area from the North side (North Sulawesi and Gorontalo Province) is inaccessible due to the damage. The road Access from the South (from Makassar-South Sulawesi and Poso-Central Sulawesi) has started to be cleared. Though, the Mutiara Sis al-Jufri Palu Airport has been opened on 3rd October 2018.³

A month before the disaster, the Indigenous Peoples' Alliance of the Archipelago of Central Sulawesi Chapter (AMAN Sulawesi Tengah) began the implementation of the DGM-I program in 3 districts namely Sigi (three communities), Parigi Moutong (one community) dan Poso (nine communities).

Facilitating 13 communities, AMAN Sulawesi Tengah the communities were very exciting. They started the socialization in 3 districts. The communities and local government were willing to support the program and agreed to process the Local Regulation on Recognition and Protection of Indigenous People in each district.

Rizal Mahfud, the Project Manager, said that when the earthquake happened, the staff in AMAN Sulawesi Tengah office were developing a report of the activities during September 2018. They survived after got out from the office during the break between first and second earthquakes.

Fortunately, their office has minimal damage, only crack on the wall. Even their office became a hub to stored aid from all over places in Indonesia.


Somehow, the disaster encouraged Local Government in Poso District to accelerate the development of Local Regulation on Recognition and Protection of Indigenous People in Poso District.

Although their completion program is two months ahead, the communities in Poso District are confidence with their draft of Local Regulation which encourages them to conduct livelihood development which crafting bag and traditional clothes from the skin of the special tree.

¹ <https://reliefweb.int/report/indonesia/aha-centre-situation-update-no-3-m-74-earthquake-and-tsunami-sulawesi-indonesia>

² http://www.searo.who.int/indonesia/areas/emergencies/exsitrep_no2_sulawesi_eq_and_tsunami_20181003_rev.pdfplementation and this project is the realization of my "life"

³ Ibid



Menjamin Hak Perempuan Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam di Desanya

Perempuan Adat Goiso Oinan berdiskusi bersama kelompok Pengembangan Mata Pencarian Alternatif. Foto : AMAN Mentawai

Program ini merupakan fasilitasi untuk 3 komunitas adat; dua komunitas yaitu Matobe dan Rokot berada di Kecamatan Sipora Selatan dan satu komunitas yaitu Goiso Oinan berada di kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Fasilitasi memastikan hak dan peran perempuan adat dalam mengelola sumber daya alam, dilaksanakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kepulauan Mentawai atau singkatnya AMAN Mentawai.

AMAN Mentawai telah memfasilitasi ketiga komunitas ini sejak pemetaan partisipatif wilayah adat mereka. Selama fasilitasi, AMAN Mentawai mengamati bahwa ketiga komunitas ini berjuang dalam menjaga siklus alam dan lingkungan secara baik menghadapi modernisasi perusahaan yang memproduksi kayu di lahan milik masyarakat adat. Keberadaan perusahaan tidak memberikan kesejahteraan yang diharapkan masyarakat, mereka menentang keberadaan perusahaan. Karena usaha produksi kayu telah menghilangkan kesejahteraan, tidak hanya masyarakat tetapi juga lingkungan. Bagi masyarakat adat, kesejahteraan tidak hanya tentang masyarakat tetapi juga lingkungan, ekosistem, tempat masyarakat tinggal.

Kecamatan Sipora Selatan dan Sipora Utara memiliki banyak sumber daya alam seperti umbi untuk makanan, ikan (baik dari laut dan sungai), rotan, bambu, cengkeh, pandan, dan pohon-pohon palem (diproduksi sebagai gula aren). Namun demikian, status ekonomi masyarakatnya miskin.

Ketiga komunitas ini memiliki kearifan lokal dalam berbagi peran antara Perempuan dan laki-laki. AMAN Mentawai mengeksplorasi kearifan lokal dari tiga komunitas ini melalui diskusi intensif yang disambut hangat oleh komunitas. Awalnya, masyarakat tidak menyadari kearifan lokal ini. Setelah melakukan serangkaian diskusi dan dicatat dalam rancangan peraturan desa, maka perempuan adat dan masyarakat juga pemerintah desa sadar dan mendukung peran perempuan

adat dalam mengelola sumber daya alam di desa.

Ada pengaturan adat untuk pengelolaan sungai dan anak sungai (Oinan dan Sopak); juga pengaturan untuk pengelolaan laut dan pantai (Koat, Buggei), di samping pengelolaan hutan (Leleu) dan rawa (Onaja). Dalam pengelolaan sungai dan anak sungai aliran, perempuan adat berperan dalam menangguk ikan air (Manairi), mengambil ikan dengan mempersempit ruang gerak ikan (Manakkla), menangguk ikan air pada musim hujan (Mamatpat), menjaga dan merendam kayu Toek di mana ada cacing yang dapat dikonsumsi (Kudduat Toek adalah tempat cacing kayu bersarang dan nama jenis kayunya tumung, direndam didalam sungai atau anak sungai kurang lebih 3 bulan) (Kudduat Toek), dan alat tangkap ikan disungai dan anak sungai yang terbuat dari bambu memasukkan wadah memancing yang dibiarkan selama satu malam dan diambil ikannya pada esok hari (Pendelet Leggeu).

Selain itu peranan perempuan di pantai adalah menangguk ikan dengan menggunakan alat tangkap yang lebih besar (Mamanu), mengambil kerang laut (Murobu, Mulilit, Mukopek, Musikkoira), mengambil Kepiting (Mulagguk, Muaggau, Muaggau), mengambil daun nipah (Masi alak buluk bolak), dan mengambil udang kecil (Mukuak). Sedangkan peranan dan hak perempuan dalam mengelola hutan dan rawa, adalah mengambil bahan baku untuk menenun topi, tas, tikar dan alat memasak. Seain itu juga menanam keladi, sagu, dan bahan pangan local. Namun dalam mengambil bahan baku dan menanam, ada aturan yang tidak boleh merusak hutan dan rawa.

Kearifan lokal tentang peran perempuan dalam mengelola sumber daya alamnya telah dilupakan, untuk mengingat dan menghidupkan kembali membutuhkan diskusi intensif dengan para tetua dan perempuan adat. Sekarang, masyarakat telah membentuk tiga kelompok usaha yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Terdaftar Kelompok (SKTK) agar kelompok tersebut mendapatkan

dukungan dari pemerintah daerah. Setidaknya ada 25 wanita yang berkumpul dalam kelompok bisnis di setiap komunitas.

Melalui DGM-I, AMAN Mentawai memfasilitasi kelompok untuk memiliki mesin anyaman dan bisnis makanan lokal. Secara bertahap, para wanita

mendapatkan kepercayaan diri dan kekuatan mereka untuk meningkatkan mata pencaharian keluarga dan komunitas mereka dari sumber daya alam mereka di desa.

Ensuring indigenous women rights in natural resources management

The project is about facilitating 3 indigenous communities, namely Goiso Oinan in North Sipora Sub District; while Matobe and Rokot in South Sipora Sub district of Mentawai Island Regency in West Sumatra Province, to ensure indigenous women rights and roles in managing natural resources. The facilitation done by the Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago of Mentawai Island Chapter or in short AMAN Mentawai.

AMAN Mentawai has accompany these three communities since facilitating their indigenous area participatory mapping. During the facilitation, the AMAN Mentawai observed that these three communities are struggling in keeping good nature cycle and environment against the modernize corporate manufacturing timber on the land that the community's belief belong to them. Since the establishment of the corporate doesn't give proper well-being that the communities expected, they against the existence of the corporate. The well-being is not only about the communities but also the environment, the ecosystem, that the communities live in.

South Sipora and North Sipora sub districts have abundance of natural resource such as tuber for food, fish (both from sea and river), rattan, bamboo, clove, pandanus, and palm trees (produced as palm sugar). Nevertheless, the community economic status is poor.

These three communities have their local wisdom in sharing role between women and men. AMAN Mentawai explored those three community's local wisdom through community discussion which been warmth welcomed by the community. Initially, the communities were not aware of this local wisdom. After having series discussions and recorded in the draft of village regulation, then the indigenous women and the community also the village government are aware and support the role of indigenous women in managing natural resources in the village.

There is indigenous arrangement for taking natural resources through river and stream management (Oinan and Sopak); also arrangement for sea dan seashore management (Koat, Buggei), in addition to forest (Leleu) and swamp (onaja) management. In the river and stream management, indigenous women have role such as dug water (Manairi), catching the fish by narrowing the space (Manakkla), put a buck in the rainy season (Mamatpat), keep and soak the Toek Wood for three months so then worms in the Toek Wood can live and can be consumed (Kudduat Toek), and put fishing weaving jar then leave it for the night and taken the fish in the next day (Pendelet Leggeu). Women activities in the seashore are catching the fish with a larger fishing gear (Mamanu), take seashells (Murobu, Mulilit, Mukopek, Musikkoira), take crab (Mulagguk, Muanggau), take nipah (palm) leaves (Masi alak buluk bolak), and take small shrimp (Mukuak). While in the forest and swamp, women can take raw material for weaving hat, bag, mat and cooking utensil.

The local wisdom has been forgotten. It took intensive discussion with the elders and indigenous women to remembering and reviving the local wisdom on women roles in managing natural resources.

Now, the communities have established three business group and equipped by the local permit (Surat Keterangan Terdaftar Kelompok/ SKTK) for the group to get support from local government. There are at least 25 women gathered in the business group in each community.

Through DGM-I, AMAN Mentawai facilitated the groups to have weaving machine and local food business. Gradually, the women gain their confidence and strength to improve their family and community livelihood from their natural resources in the village.



Noken Namblong dari Pohon Mahkota Dewa dan Melinjo

Kebun penanaman ORPA Namblong. Foto : ORPA Namblong

Bagi masyarakat Papua, noken memiliki makna filosofis dan simbol-simbol kehidupan tersendiri. Noken dianggap sebagai simbol wanita Papua, kesuburan, kekeluargaan, ekonomi, kehidupan yang baik, perdamaian, dan identitas. Sebagai budaya asli Papua, noken memiliki hubungan erat dengan alam. Noken terbuat dari bahan dasar serat kulit kayu dan pewarna alami yang berasal dari akar tumbuhan dan buah-buahan hutan. Anyaman yang dibuat oleh para mama (ibu suku-suku) Papua umumnya dijadikan sebagai wadah serbaguna.

Keunggulan dan keunikan noken tersebut mengantarkan tas rajut khas Papua ini masuk dalam Daftar United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) sebagai salah satu “Warisan Budaya Tak Benda” atau intangible heritage, dan setiap tanggal 4 Desember diperingati sebagai “Hari Noken Sedunia”.

Papua memiliki lebih kurang 250 suku, dan setiap suku berbeda-beda dalam merajut noken. Salah satunya noken dari Namblong.

Noken dari Namblong ini dianyam oleh mama-mama yang memiliki tradisi menanam pohon dan juga berkebun sebelum menikah. Berdasarkan pengalaman mama-mama, bahan baku noken yang paling kuat dan lembut adalah dari serat pohon Mahkota Dewa dan Melinjo. Sehingga terdapat program penanaman pohon Mahkota Dewa dan pohon Melinjo di lahan masyarakat adat namblong.

Tradisi menanam, berkebun dan menganyam noken merupakan tradisi yang melekat dengan Perempuan adat Namblong. Kesuburan lahan di Namblong dan juga sejarah Namblong yang maju, mendorong Perempuan Adat Namblong untuk menguatkan diri dalam lembaga Organisasi Perempuan Adat (ORPA) Namblong.

ORPA Namblong yang merupakan bagian dari Dewan Adat Papua yang bertujuan mengembangkan penghidupan Perempuan Adat Namblong. Lembaga ini dibentuk pada tahun 2012 dan dikuatkan kembali pada tahun 2017, ORPA Namblong diketuai oleh Ibu Rosita Tecuari dengan jumlah anggota sekitar 50 orang.

Dari sejarahnya, saat Belanda menguasai tanah Papua, Namblong adalah daerah yang sudah cukup maju. Memiliki produksi furnitur dari rotan dan juga hasil pertanian serta perkebunan yang dikirim ke luar tanah Papua karena permintaan pasar baik dari Nusantara maupun luar Nusantara. Namun kemajuan itu menjadi cerita selama sekian tahun. Pada tahun 2012 dengan terbentuknya ORPA Namblong, mama-mama di Namblong memantapkan niat untuk kembali memajukan kondisi Namblong dan menjadi lebih baik lagi.

Dorongan dari Dewan Adat Papua dan juga PtPPMA, ORPA Namblong melaksanakan program DGM-I yang memberikan kesempatan kepada sekitar 50 perempuan adat berkomitmen untuk melaksanakan penanaman di pekarangan rumah maupun di lahan miliknya. Sekitar 30 mama-mama sudah memiliki bibit pohon mahkota dewa dan juga

pohon melinjo. Kedua pohon memiliki serat yang kuat tapi lembut sehingga saat di pilin menjadi benang noken, memudahkan para Perempuan dalam menganyam nya.

Selain itu mama-mama menanam ubi, jagung dan singkong untuk keperluan pangan keluarga. Selama satu tahun ini, sudah 1 kali panen umbi-umbian dilakukan. Mama-mama juga bergiat

dalam mengolah bahan pangan local untuk usaha. Noken digunakan untuk membawa hasil panen dan bahan pangan lain dari kebun maupun dari pasar.

Setelah program DGM-I, ORPA Namblong berencana membuat festival noken di Namblong.

Noken Namblong from the Mahkota Dewa and Melinjo Trees

For the people of Papua, noken has a philosophical meaning and its own life symbols. Noken is considered as a symbol of Papuan women, fertility, kinship, economy, good life, peace and identity. As a native Papuan culture, noken has a close relationship with nature. Noken is made from bark viber and natural dyes derived from vegetable plants and forest fruits. Plaits made by Papuan mothers (tribal mothers).

The superiority and uniqueness of noken from Papua has put this unique Papua knit bag to the UN List, the Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) as one of the "Intangible Cultural Heritage" or intangible heritage, and every 4 December is celebrated as "International Noken Day".

Papua has approximately 250 tribes, and each tribe is different in knitting noken. One of them is Noken from Namblong.

Noken from Namblong is woven by mothers who also have a tradition of planting trees and also gardening before marriage. Based on mama-mama's experience, the strongest and softest noken raw material is from the fibers of trees. This experience and also tradition has encouraged indigenous women of Namblong to propose the Mahkota Dewa tree and Melinjo tree planting programs on their land.

The tradition of planting, gardening and weaving noken is an inherent tradition with the indigenous women of Namblong. The fertility of the land in Namblong and also Namblong's history have encouraged Namblong Indigenous Women to strengthen themselves in establishing the Namblong Indigenous Women's Organization (ORPA).

ORPA Namblong which is part of the Papua

Indigenous Council, aims to develop the livelihoods of Namblong Indigenous Women. This institution was formed in 2012 and strengthened again in 2017. ORPA Namblong is chaired by Rosita Tecuari with a membership of around 50 indigenous women of Namblong.

From its history, when the Dutch colonialized the land of Papua, Namblong was an advanced area with the production of furniture from rattan and also agricultural products and plantations. The products exported outside the land of Papua because of market demand from both national and international. However, those progress became story for many years. In 2012 with the formation of the ORPA Namblong, the mothers in Namblong established their intention to improve Namblong's condition and become even better.

Encouraged by the Papuan Customary Council and also the PtPPMA, ORPA Namblong implemented the DGM-I program which provided an opportunity for around 50 indigenous women to commit to planting in their home yards and on their land. Around 30 mamas already have the Mahkota Dewa tree and also the gnemon tree seeds. Both trees have strong but soft fibers so that when they are twisted into noken thread, it makes easier for women to weave them.

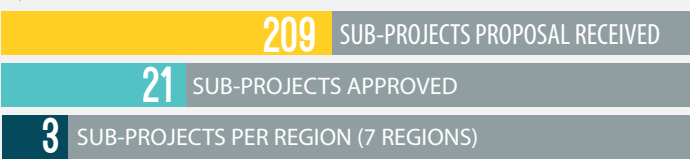
In addition, Namblong women grow sweet potatoes, corn and cassava for family food subsistence. During this year, the women has done the harvest. The women are also processing local foods for business. Noken is used to bring harvests and other foodstuffs from the garden or from the market.

After the DGM-I program, ORPA Namblong plans to create a noken festival in Namblong.

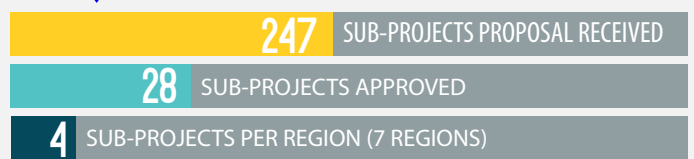
DGM-I SUB-PROJECTS



FIRST ROUND OF SUB-PROJECTS



SECOND ROUND OF SUB-PROJECTS



NATIONAL EXECUTING AGENCY (NEA)

THE SAMDHANA INSTITUTE
Jalan Tampomas No. 33 Bogor 16128 Jawa barat, Indonesia
Phone +62 251 7546173